

PERSEKUSI

BK DPD Bentuk Tim Pencari Fakta

BADAN Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) membentuk tim pencari fakta (TPF) untuk menyelidiki laporan tentang kasus persekusi terhadap Ustaz Abdul Somad yang diduga melibatkan senator asal Bali Arya Wedakarna. Keputusan itu diambil dalam rapat pleno BK DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/12).

"Rapat pleno pleno BK memutuskan membentuk tim pencari fakta," kata anggota BK DPD Dedi Iskandar Batubara.

Senator dari Sumatera Utara (Sumut) itu menambahkan, TPF bentukan BK DPD itu terdiri dari tujuh orang. "Mulai bekerja minggu depan," tegasnya.

Dia menjelaskan, tugas TPF sudah diatur oleh tata tertib dan tata cara DPD. Antara lain mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan, serta meminta keterangan dari yang bersangkutan dan para pelapor.

TPF juga akan melakukan telaah atas hasil temuannya dan melaporkan hasilnya di pleno BK DPD untuk mendapatkan keputusan. Untuk itu, TPF akan tetap bekerja meskipun DPD akan memasuki masa reses pada 21 Desember 2017.

Dedi menegaskan, TPF tetap bekerja saat DPD reses mengingat pentingnya persoalan yang menimpa ustaz asal Riau itu. "TPF diharapkan dapat melaporkan hasil kerjanya pada penutupan Masa sidang di bulan Maret," katanya. (boy/jpnn/nug)

GOLKAR

Priyo Budi Santoso Protes Aklamasi Airlangga

SEKRETARIS Dewan Kehormatan Partai Golkar (PG) Priyo Budi Santoso mempersoalkan proses aklamasi Airlangga Hartarto sebagai ketua umum PG yang hanya lewat rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PG.

Dia mengaku sangat menghormati Airlangga dan menganggapnya sangat layak sebagai pemimpin partai.

"Tapi, apakah aklamasi harus dipaksakan lewat jalan pintas seperti ini, hanya lewat rapat pleno DPP (PG)? Rapimnas & Munaslub hanya tinggal pengesahan?" kata Priyo, Jumat (15/12).

Priyo khawatir ini langkah yang berisiko dan menjadi lubang delegitimasi di tengah upaya membangun PG yang solid. "Saya anjurkan Golkar tetap mempertahankan mekanisme demokratis, berkompetisi secara sehat, buka pintu lebar-lebar siapa pun figur yang ingin maju," katanya.

Karena itu, Priyo menyarankan tidak perlu ada penghalangan atau cara-cara berlebihan yang bisa berakibat fatal dan berisiko. "Setelah itu semua, terhadap siapa pun yang terpilih punya legitimasi yang kuat, dihormati dan dipatuhi," jelasnya.

Priyo mengklaim kaget sebagai orang lama berkecimpung di jenjang partai, karena rapat pleno DPP sudah memutuskan pengganti ketum dan tinggal pengesahan di rapimnas dan munaslub dengan calon tunggal. "Rapat pleno DPP punya kewenangan termasuk usulkan PAW pengurus, tapi khusus untuk penggantian ketum di tengah jalan hanya bisa lewat munaslub yang sehat dan demokratis," paparnya.

Mantan wakil ketua DPR itu mengatakan biarlah DPP dan 2, serta organ-organ pusat partai se Indonesia memilih ketum yang baru. (boy/jpnn/nug)



Bendungan Ciawi Segera Terwujud

Presiden RI, Joko Widodo meninjau proyek pembangunan Bendungan Ciawi Kabupaten Bogor, Jumat (15/12).

Tolak Perluas Pasal Perzinaan, MK Dituding Sekuler

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid menyesalkan sikap Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak desakan memperluas pasal perzinaan dan melarang hubungan seksual di antara kaum homoseksual. "MK tidak Pancasila, tapi sekuler," kata Sodik, Jumat (14/12).

Ketua DPP Partai Gerindra itu menambahkan, perluasan aturan perzinaan memang berbasis agama. Namun, hal itu diakomodasi oleh Pancasila.

Menurut Sodik, MK seharusnya mengakomodasi hal tersebut. Sebab dalam negara Pancasila, hubungan seksual diluarpernikahan memperlakukan aturannya. Dan, salah satu misi dan semangat dasar Pancasila adalah mempertahankan dan membina keutuhan keluarga Indonesia.

Karena itu, dia juga menyesalkan sikap MK yang menolak uji materi tentang hubungan homoseksual.

Menurut Sodik, penolakan itu memiliki arti hubungan sejenis

adalah legal. "Penolakan MK ini akan makin memperkuat semangat kelompok LGBT untuk meluaskan perilaku dan misinya di Indonesia," kata Sodik.

Diketahui, pihak yang menjadi pemohon ini adalah Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Euis Sunarti dengan beberapa orang lainnya. Mereka menggugat Pasal 284 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP yang mengatur soal perzinaan, perkosaan, dan juga pencabulan. Pasal-pasal tersebut saat ini ini dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR Jazuli Juwaini, mengaku menyayangkan putusan MK yang tidak mengabulkan permohonan uji materi pasal kesusilaan dalam KUHP. Sebab, perilaku asusila seperti LGBT dinilai telah melanggar falsafah bangsa.

"Permohonan ini adalah upaya mengokohkan kebangsaan yang beradab, bermarta-

bat, dan religius sesuai Pancasila dan UUD 1945 sebagai nilai-nilai luhur bangsa. Sejatinya ini bagian dari tanggung jawab kita untuk menjaga moral, karakter, dan identitas bangsa," kata Jazuli kepada JawaPos.com, Jumat (15/12).

Menurutnya, permohonan uji materi yang dilayangkan sangat rasional, objektif, dan konstitusional. Hal itu dapat terlihat dari dalil-dalil yang disampaikan.

Pemohon juga mengaku apa yang dilakukannya merupakan bagian dari upaya untuk mencegah meluasnya berbagai penyimpangan, kejahatan seksual, dan penyakit sosial yang dapat merusak masa depan generasi bangsa.

"Saya melihat uji materi dimaksudkan untuk melindungi anak-anak, menjaga ketahanan keluarga, dan mengokohkan kebangsaan yang beradab, bermartabat, dan religius, sehingga MK seharusnya menerimanya," terangnya. (boy/jpnn/ce1/aim/JPC/nug)

MUI Gelar Aksi Bela Palestina

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menggelar Aksi Bela Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS) dan kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat, Minggu (17/12) dengan salah satu tujuannya menuntut Presiden AS Donald Trump mencabut pernyataan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Donald Trump harus mencabut keputusannya menjadikan Yerusalem ibu kota Israel dan kami harap AS tidak jadi memindahkan kedubesnya dari Tel Aviv," ucap Ketua MUI Maruf Amin di kantornya, Jumat (15/12).

Dia juga meminta seluruh umat muslim di Indonesia bersatu membela Palestina. Majelis ulama di negara lain juga menyerukan hal serupa untuk ikut dalam aksi mengemang Trump. "Brunei mengatakan mereka akan datang ke Jakarta. Kami mengajak seluruh negara tetangga untuk ikut hadir karena mereka merasa Saudara kita di Palestina sudah terjajah lama," ucapnya.

Maruf melanjutkan, Indonesia perlu terus memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia dan Afrika. Negara Palestina pun mestinya menjadi prioritas pertolongan lantaran belum memiliki kemerdekaan yang penuh.

"Bahkan sekarang Yerusalem Timur itu menjadi ibu kota Palestina tapi mereka masih terjajah, terbelenggu, sering mendapat pengeboman, diblokir, dan yang paling memprihatinkan ketika Donald Trump justru menetapkan bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel," tegas dia.

Sementara itu, sejumlah tokoh lintas agama di Indonesia juga mengemang klaim sepihak Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel. Tergabung dalam Forum Solidaritas Lintas Agama untuk Kemanusiaan itu menilai klaim sepihak Trump itu berdampak langsung pada stabilitas politik dan keamanan internasional.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj menyatakan, sebagai wujud implementasi diktum pembukaan UUD 1945 yang berbunyi; "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."

"Maka kami mendukung langkah pemerintah Indonesia untuk terus memperjuangkan dengan lantang tentang kedaulatan Palestina," kata Said Aqil saat membacakan pernyataan sikap di Kantor PBNU, Jakarta, Jumat (15/12).

Pendeta Henriette Hutabarat dari Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) menambahkan, sebagai pimpinan agama pihaknya juga mengemang keras tindakan klaim sepihak Trump atas Yerusalem sebagai ibukota Israel. Sebab, semestinya Kota Suci Yerusalem tersebut adalah ibukota Palestina. "Klaim sepihak itu merupakan sikap yang selain berdampak langsung pada stabilitas politik dan keamanan internasional, juga sekaligus melanggar prinsip hukum humaniter dan Resolusi Dewan Keamanan PBB atas Yerusalem," ujar Henriette. (mg1/jpnn/put/JPC/nug)

Kemenag Tolak Ribuan Pendaftaran Haji

Sudah Berhaji dalam Sepuluh Tahun Terakhir

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) menolak pendaftaran haji 2.702 orang. Penolakan itu karena mereka sudah pernah berhaji dalam rentang sepuluh tahun terakhir.

Menag Lukman Hakim Saifuddin menghimbau supaya masyarakat mematuhi larangan itu dan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang

syarat lainnya. "Untuk kesekian kalinya saya menghimbau betul dengan sedalam-dalamnya," katanya di kantor Kementerian Kominfo kemarin (15/12).

Dia menuturkan alasan pembatasan atau larangan itu supaya jamaah yang sudah pernah berhaji dalam sepuluh tahun terakhir, memberikan kesempatan kepada masyarakat lain.

Khususnya kepada masyarakat yang belum pernah berhaji. Sebab animo berhaji

terus menanjak, sedangkan kuotanya terbatas.

Dalam aturan agama, haji yang pertama bagi mereka yang sudah mampu secara finansial maupun kesehatan adalah wajib.

Sedangkan bagi yang sudah pernah berhaji, maka haji yang berikutnya itu hukumnya sunnah.

"Di ajaran agama itu yang sunnah tidak bisa mengalahkan yang wajib. Yang wajib harus didahulukan," jelasnya.

Kepala Subdirektorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler Kemenag Noer Alya Fitra menuturkan sejak 17 April 2016 tercatat ada 2.702 pendaftaran haji yang tertolak oleh sistem komputerisasi haji terpadu (Siskohat) Kemenag.

Alasannya adalah yang bersangkutan terdeteksi sudah pernah berhaji dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. "Yang coba-coba mendaftar kemudian terbaca oleh sistem, langsung

tertolak otomatis," tuturnya.

Di dalam Siskohat Kemenag sudah ada rekam data seluruh jamaah yang pernah berhaji. Ketika ada yang melakukan pendaftaran baru, maka sistem di Siskohat akan melakukan pencocokan dengan data-data yang telah tersimpan.

Nafit menegaskan melalui basis data yang terkumpul, sistem bisa membandingkan data pendftar baru dengan data sebelumnya. (wan/jpc/nug)

Surabaya Cekli

Pemasangan iklan
Hubungi: RADAR SURABAYA
Telp: (031) 355 9498 | (031) 355 9499
0822 4494 7191 | 0822 4447 6399
Alamat: JI. Kembang Jepun 167-169
Surabaya



RUPA-RUPA

SURABAYA PELUANG USAHA

CARI member/ distributor produk kosmetik dan Sophie Martin (tas, dompet, sepatu, acesories, perabot mm, baju dll) dptkan keuntungan 30% dan bonus. Sgr hub mia sms/wa: 081330247859

"BANTUAN MODAL" Usaha Jual Pentol Keliling ataupun Spot. Hasil 3,5Jt/bln. Syarat KTP Surabaya, Gresik, Sidoarjo. Punya motor sendiri. Hub/WA 0852 3431 1008

CARI JODOH

MAS VIAN, Jejaka Wiraswasta cari jodoh Wanita yang baik. Telp/WA 0812 5982 7871

JEJAKA S2-Mapan Ganteng Cari Gadis Cantik Minimal S1 Diutamakan Dokter atau Cina Max 344 yang serius saja Hub:081227543444

SURABAYA RUPA-RUPA

• Chemical Laundry •
Menyediakan Bahan Laundry/Peralatan Laundry dan mencari agen/reseller untuk dijual lagi, ada harga khusus agen/reseller. Menyediakan: - Parfum laundry - Prostek, Karbol, - S Cuci piring, Molto, - Detergent, dll.
HUB: 082245154092 | (wa) 085746804979

SERAGAM SEKOLAH

GRATIS ONGKIR seragam sekolah Purnama grup SD, SMP, SMA, dan Pramuka. SBY Telp 031 3531493 | 0813 3188 2345

RADAR SURABAYA CEKLI
MINI KOLOM:
1 klm x 25 mm atau 1 klm x 50 mm

KEHILANGAN

SURABAYA

Hilang STNK honda th2013 a/n maspati6/16 nopol L-6371-TF

Hilang STNK honda th2011 a/n rahayu d/a dapuan tegal9/64 nopol L-5865-NY

Hilang STNK suzuki th1998 a/n moebin d/a tanah merah 4/46 nopol L-1142-QF

Hilang STNK nopol L-4116-FR a/n Vikky Noviyanto d/a Medokan Semampir Blok D/25. Hub:08113464646

Hilang BPKB Kawasaki Kaze E nopol L-6810-QB MH4KA110EK056360. Hub:087854363417

HILANG BPKB MOTOR HONDA TH 2012 Wm Putih Nopol L-5529-SF A/N Bagus Mertha Pradnyana D/A Teluk Kumai Barat 113/16 RT 003/002 Perak Utara Sby

Hilang STNK HONDA 2004 L-5778-BG A/N Sugiyanto Jl. Rungkut Tengah 4A/2A Surabaya

SURABAYA

Hilang STNK MOTOR HONDA L2997OT A/N Soegeng Edy P D/A Tempel Sukorejo 4/33 Sby

Hilang STNK HONDA TH 2013 A/N Maspati 6/16 Nopol L-6371-TF

Hilang STNK L-6876-G an. Ahmad Subeda d/a Jambangan 1/6 Surabaya

Hilang STNK yamaha L-5142-EB an. Kalis Rahayu d/a Kendangsari 75 Surabaya

Hilang STNK Honda L-4177-MK an. Lindasari d/a Kutisari utara 2/2 Surabaya

Hilang STNK Honda L-4713-MF an. Wiwit Aini d/a Karah IV/41A Surabaya

Hilang STNK Mits W-8840-VC an. Exelent Kencana PT/d/a Ds. Kesamben Wetan Dryorejo Gresik

Hilang STNK Honda Supra X 125 W-5210-PU a/n Passadhi Agung Nugroho d/a Jl. Kapuas FL-7 Wistrop Kec.Waru Sda. Hub: 085230718699

SURABAYA

Hilang BPKB nopol L-3706-EF a/n Anton Syahbani d/a Nginden III-E/6 Sukolilo Surabaya

HILANG STNK MOBIL DAIHATSU XENIA NOPOL L-1837-QZ a/n Lie Freddy Andrew d/a Jl. Kapas Gading Madya 2B/25 Surabaya Hub : 085106012818

Hilang STNK KAWASAKI KAZE th 2001 a/n Go lin Juwita d/a Kalibutih 117 Nopol L-6810-QB

HILANG BPKB MOTOR NOPOL L-5153-YT a/n G. ST Vincentius A Paulo Hub : 0895336301371

HILANG STNK HONDA 2004 L-5778-BG a/n Subiyanto d/a Jl. Rungkut Tengah 4A/2A Surabaya

HILANG STNK MOTOR YAMAHA L-5844-MB a/n Aisyah Aulia d/a Sidosermo 4 Gg. Pondok No. 25 Sby

HILANG STNK BPKB SPD MOTOR HONDA L-6762-QX TH 2014 Wm Merah a/n Aimin Naim d/a Bulak Banteng Tengah no.61 Sby

SURABAYA

HILANG STNK HONDA TH 2012 L-5210-CO a/n Arif Susanto d/a Kapas Madya 3-E/4 Surabaya

Hilang STNK Yamaha th 2013 a/n Imam d/a Pogot Jaya 157 nopol L-6658-SZ

Hilang STNK Yamaha th 2014 a/n Trianto d/a Simokerto Tebasan 21 nopol L-5535-RC

Hilang STNK Honda th 2010 a/n Djawari d/a Bulak Jaya 3/48 nopol L-6635-QZ

Hilang STNK Yamaha th 2013 a/n Herlin d/a Tanah Merah 4 Semanggi 23 nopol L-5498-SJ

Hilang STNK Suzuki th 2005 a/n Chuzaini Sidotopo Jaya 3A/25 nopol L-2281-PE

Hilang STNK Yamaha th 2010 a/n Dimas d/a Kampung Malang Utara 7/19 nopol L-6095-SE

Hilang STNK Honda th 2016 a/n Amita d/a Margorukun 4/50 nopol L-2569-SO

SURABAYA

Hilang STNK nopol L-4768-NX a/n M. Zainul Ihsan d/a Pesapen Tengah No 11 Sby 0821 2272 2016 (Vivi)

Hilang STNK Honda L-5539-JI a/n Aulia Rahman d/a Jl. Ngagel Baru 1/40 Sby

Hilang BPKB Honda Freed th'13 L-1634-JA a/n Mieke Sri Kristarini d/a Jl. Jemur Andayani 12/25 Sby

Hilang STNK Honda City th'05 L-1182-VJ a/n Ana Ningsih Harun d/a Jl. Arjuno 102 Sby

Hilang BPKB BMW th'97 L-1095-HD a/n Ida Nuraini d/a Jetis Wetan 3/8 Sby

Hilang BPKB Toyota Kijang th'93 L-1090-TH a/n Wahyu Sodikin d/a Jl. Menur Pumpungan 12 Sby

PROBOLINGGO

Hilang STNK Honda N-6929-SD a/n Dhoifir d/a Trowong Kidul Kademangan Probolinggo